**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakangg**

Pahammdemokrasi merupakan paham yang sangat menjunjung tinggi hak-hak dasar sebagai manusia, salah satu contohnya adalah bahwa setiap orang memiliki satu hak kebebasan, baik itu kebebasan dalam berekspresi, berkeyakinan maupun berperilaku. Pada hakikatnya ciri utama suatu negara yang menganut paham demokrasi ialah dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu) secara periodik dalam tenggang waktu tertentu. Hal tersebut dikatakan sebagai indikator utama negara demokrasi, karena Pemilihan umum telah menjadi salah satu parameter utama oleh masyarakat internasional untuk melihat demokratis tidaknya suatu negara.

Indonesia merupakan Negara yang menganut paham demokrasi yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Indonesia memiliki tiga jenis Pemilu, yaitu Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) di daerah tertentu.

Kesadarannpolitikkwargaanegaraamenjadiifaktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya berbagaiihallyangbberhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi kadar dan ukuran seseorang terlibat dalam prosesspartisipasi politik. Partisipasi politik adalah faktor yang menunjukkan apakah pemilihan umum tersebut berlangsung dengan baik atau tidak yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka tingkat keberhasilan pemilihan umum semakin baik.

Partisipasiipolitikssebagaiiaaktualisasiikkedaulatanrrakyattaadalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi, maknanya sangat penting bagi perkembangan kultur politik dan sistem demokrasi. Tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi, akan berimbas positif terhadap proses pembangunan dan selanjutnya, hal ini akan menjadi langkah yang signifikan bagi kemajuan bangsa dan negara. Namun demikian yang perlu kita garis bawahi ialah  partisipasi politik yang bermakna positif seperti itu adalah partisipasi politik yang memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif.

Partisipasi politik yang konstruktif dan mampu mendorong proses politik secara dewasa dan menjadi input yang baik bagi implementasi kebijakan penguasa merupakan partisipasi politik yang kualitatif. Sedangkan partisipasi politik yang kuantitatif berkaitan dengan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan dukungan terhadap implementasi kebijakan. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena tinggi rendahnya partisipasi politik dapat mendeskripsikan tingkat demokratisasi dan merupakan aktualisasi dari kedaulatan rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).[[1]](#footnote-1) Masyarakat merupakan faktor sentral dalam suatu negara demokrasi. Demokrasi tidak akan dapat diwujudkan tanpa adanya partisipasi masyarakat karena hakekat demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat.

Pada Pasca reformasi, demokrasi Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga Negara. Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( pilkada ).

Pemilihan kepala daerah dalam konteks teoretis demokrasi lokal berkaitan erat dengan desentralisasi kekuasaan. Sedangkan desentralisasi kekuasaan pada dasarnya diwujudkan dengan adanya otonomi pada tingkat lokal untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu yang terpenting dalam demokrasi lokal adalah rekrutmen politik yang menjamin kelangsungan demokrasi di daerah.

Pemilihan Kepala Daerah termasuk rekrutmen politik yang merupakan penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Aktor utama sistem pemilihan kepala daerah adalah rakyat, parpol dan calon kepala daerah. Ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Kegiatan tersebut antara lain: pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih.

Dengan adanya pemilihan kepala daerah diharapkan dapat menunjang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang pro demokrasi di daerah. Pemerintah di tingkat lokal akan semakin dekat dengan rakyat yang pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas yang tinggi dari rakyat untuk pemerintah daerah dan juga akan terciptanya respon yang baik dari rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik baik dalam memilih atau dipilih. Setiap warga Negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan politik. Warga Negara berhak melakukan kegiatan secara bebas menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.

Hak rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung merupakan buah dari reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998. Pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa dengan cara mobilisasi dan rakyat tidak diberi hak politik untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, maka setelah reformasi melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu amandemen pertama pada tahun 1999 hingga amandemen ke empat pada tahun 2002, rakyat mendapatkan hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Disamping itu, perubahan UUD 1945 mengakibatkan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah, yaitu dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU 23 tahun 2014 tersebut memberikan hak politik rakyat untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/ Walikota beserta Wakil Bupati/Wakil Walikota secara langsung. Dengan demikian hak politik masyarakat untuk melakukan partisipasi politik secara langsung menjadi terbuka lebar, karena rakyat berhak memilih secara langsung para pemimpinnya pada jalur eksekutif dan menentukan sendiri para wakilnya pada lembaga-lembaga legislatif.

Partisipasi politik masyarakat didorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan yang dilakukan (misal pemberian suara), kepentingan mereka akan dapat disalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan mereka berkeyakinan bahwa tindakan mereka akan dapat mempengaruhi pemegang otoritas membuat keputusan yang memihak kepentingan mereka. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan akan mempunyai efek politik (political effect).

Pemilu hanya akan menjadi instrumen formal dan indikator penilaian demokrasi saja, tidak adanya substansi jika tanpa adanya pemaksimalan pelibatan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu harus terus ditingkatkan. Pada era reformasi ini sangat menjunjung tinggi adanya nilai demokrasi maka penulis melihat bahwa Strategi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dapat dilakukan melalui :

1. Pendidikan politik;

2. Memaksimalkan fungsi partai politik;

3. Memaksimalkan sosialisasi oleh penyelenggaraan pemilu.

Sebuah Negara yang demokratis menghendaki adanya pemaksimalan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Negara. Penciptaan berbagai model penerapan gagasan demokrasi menjadi salah satu upaya untuk mempercepat hal tersebut. Proses penyelenggaraan Negara harus tunduk pada produk yang dihasilkan oleh rakyat. Melalui perwakilannya di lembaga legislatif, rakyat menciptakan sebuah aturan yang pada nantinya akan dijadikan sebuah pedoman dalam penyelenggaraan Negara. Di lain sisi, juga terdapat instrumen lain yang tak kalah penting dan dapat digunakan dengan mudah untuk melihat demokratisasi dalam sebuah Negara seperti yang telah disampaikan oleh penulis diatas tadi, yaitu penyelenggaraan Pemilu secara berkala.

Keberhasilan pelaksanaan Pemilu ditentukan oleh banyak faktor. Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi adalah pemilih. Meskipun dalam gelaran Pemilu semua warga negara yang memenuhi syarat diberikan hak pilih, namun tidak semua warga negara menggunakan hak pilihnya. Masyarakat yang memiliki hak untuk memilih atau terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) namun tidak menggunakan hak pilihnya disebut Golongan Putih (Golput).

Golput merupakan istilah yang muncul pertama kali menjelang pemilu pertama zaman Orde Baru tahun 1971. Arbi Sanit mengatakan bahwa golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu. Eep Saefulloh Fatah memberikan pengklasifikasian golput atas empat golongan*,* yakni :

1. Golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah.
2. Golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu).
3. Golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan*.*
4. Golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.[[2]](#footnote-2)

Menurut Aspar dalam Gatut Saksono (2013:45), golput digunakan untuk merujuk kepada fenomena berikut : 1. Orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes, 2. Orang yang menghadiri tempat pemungutan suara tetapi tidak menggunakan hak pilihnya secara benar, dan 3.Orang yang menggunakan hak pilihnya namun dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara[[3]](#footnote-3).

Golput atau dapat penulis katakan sebagai kekecewaan politik terjadi karena berbagai persoalan: (1). Kegagalan   elit (politik) terpilih dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, (2). Adanya sikap apatis terhadap politik dari rakyat, dan (3). Rasionalitas rakyat terhadap politik semakin tinggi sehingga mereka kini akan berhitung tentang keuntungan riil yang didapat jika berafiliasi terhadap satu partai politik.

Hasil evaluasi Pemilu pada umumnya selalu menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu selalu menurun. Hal ini dapat diketahui dengan semakin tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau menjadi golongan putih (golput) dalam Pemilu. Tingginya angka golput ini sungguh mengkhawatirkan, jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya data KPU menyebut bahwa total warga yang berhak menggunakan hak pilihnya dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Indonesia pada saat Pilpres 2014 adalah 190.307.134. Namun yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 133.574.277 suara.

Dilihat dari pemilihan kepala daerah serentak 2015 juga dapat di analisis bahwa Hasil survei dari kalangan LSM (lembaga swadaya masyarakat) pada Pemilukada serentak 2015 merata-ratakan total partisipasi politik rakyat dalam Pemilukada serentak 2015 hanya mencapai angka sekitar 50-65 persen. Bahkan, dibeberapa daerah ada yang dibawah 50 persen. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya menargetkan partisipasi pemilih di 264 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2015 adalah 77,5 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 100.461.890‎ jiwa.[[4]](#footnote-4)

Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Indonesia ini memang rendah, namun hal tersebut tidak berlaku pada masyarakat Kota Tasikmalaya yang setiap tahunnya selalu menurun tingkat golputnya, hal ini ditunjukkan dengan partisipasi politik masyarakatnya meningkat setiap tahunnya. Berikut merupakan tabel partisipasi politik Masyarakat Kota Tasikmalaya.

* 1. **Tabel Partisipasi Pemilih Pemilu Kota Tasikmalaya**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pemilihan Umum** | **Partisipasi Kota Tasikmalaya** | **Rata – rata Nasional** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **PILEG 2004** | **80,04%** | **80%** |
| **2** | **PILPRES 2004** | **80,53%** | **78%** |
| **3** | **PILKADA 2007** | **80,21%** | **73%** |
| **4** | **PILGUB 2008** | **78,69%** | **67,34%** |
| **5** | **PILEG 2009** | **82,30%** | **70,99%** |
| **6** | **PILPRES 2009** | **83,88%** | **73%** |
| **7** | **PILKADA 2012** | **81,38%** | **62%** |
| **8** | **PILGUB 2013** | **78,80%** | **63,70%** |
| **9** | **PILEG 2014** | **82,82%** | **75%** |
| **10** | **PILPRES 2014** | **86,91%** | **79%** |
| **11** | **PILKADA 2017** | **81,65%** | **77,5%** |

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tasikmalaya

Rata-rata nasional merupakan target yang diberi KPU Pusat sebagai target yang harus dicapai dengan cara menjumlah semua hasil pemilu di daerah-daerah yang melaksanakan pemilu dan dibagi rata dengan jumlah DPT yang ada. Berdasarkan tabel di atas partisipasi politik Masyarakat Kota Tasikmalaya selalu lebih unggul dari rata-rata nasional dan selalu meningkat tiap tahunnya. Contoh tingkat partisipasi masyarakat pilkada 2007 sebesar 80,21 persen, pilkada 2012 meningkat menjadi 81,38 persen, dan pilkada tahun 2017 sebesar 81,65 persen. Adanya Progres seperti ini menunjukkan bahwa tingginya kepercayaan masyarakat Kota Tasikmalaya terhadap calon Pemimpin yang akan membawa kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Kota Tasikmalaya. Pada pemilihan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya 2017 terdapat 3 (tiga) pasangan calon yang terdiri dari:

1. R. Dicky Candranegara dan Drs. H. Denny Romdony dengan perolehan 85.510 suara (22,54%)
2. Drs. H. Budi Budiman dan H. Muhammad Yusuf dengan perolehan 151.931 suara (40,06%)
3. H. Dede Sudrajat, Ir., MP dan Dr. H. Asep Hidayat Surdjo, SpM., M.Kes dengan perolehan 141.854 suara (37,40%)

Berdasarkan data tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya telah menetapkan pasangan Drs. H. Budi Budiman dan H. Muhammad Yusuf sebagai pemenang pilkada Kota Tasikmalaya dalam gelaran rapat pleno penetapan peraih suara terbanyak, hal tersebut dapat dilihat bahwa terpilih kembali Drs. H. Budi Budiman sebagai Kepala Daerah Kota Tasikmalaya (Walikota) yang juga merupakan Walikota periode 2012-2017.

Berikut merupakan rincian Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya 2017 yaitu sebagai berikut :

* 1. **Tabel Daftar Pemilih Tetap Kota Tasikmalaya 2017**

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tasikmalaya

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KECAMATAN** | **JUMLAH TPS** | **DAFTAR PEMILIH TETAP** | | |
| **LAKI-LAKI** | **PEREMPUAN** | **JUMLAH** |
| **1** | **CIHIDEUNG** | **121** | **25.023** | **24.974** | **49.997** |
| **2** | **CIPEDES** | **145** | **27.485** | **27.257** | **54.742** |
| **3** | **TAWANG** | **108** | **20.838** | **21.648** | **42.486** |
| **4** | **INDIHIANG** | **82** | **18.828** | **18.659** | **37.487** |
| **5** | **KAWALU** | **144** | **32.666** | **31.295** | **63.961** |
| **6** | **CIBEUREUM** | **103** | **23.503** | **23.230** | **46.733** |
| **7** | **TAMANSARI** | **109** | **24.907** | **23.601** | **48.508** |
| **8** | **MANGKUBUMI** | **151** | **32.146** | **31.739** | **63.885** |
| **9** | **BUNGURSARI** | **90** | **18.626** | **17.918** | **36.544** |
| **10** | **PURBARATU** | **67** | **15.128** | **14.590** | **29.718** |
| **JUMLAH** | | | **239.150** | **234.911** | **474.061** |

Jumlah pemilih di Kota Tasikmalaya ialah 474.061 jiwa sedangkan yang menggunakan hak pilihnya yakni sebanyak 390.014 jiwa dengan suara yang sah sebanyak 379.295 suara sedangkan suara tidak sah hanya 10.719 yang di ambil dari 1120 TPS yang ada di Kota Tasikmalaya. Berikut rincian rekapitulasi sub wilayah perkecamatan untuk suara sah dan suara tidak sah diantaranya:

* 1. **Tabel Rekapitulasi Sub Wilayah**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KECAMATAN** | **SUARA SAH** | **SUARA TIDAK SAH** | **TOTAL** |
| **1** | **BUNGURSARI** | 28.525 | 720 | 29.245 |
| **2** | **CIBEUREUM** | 37.338 | 911 | 38.249 |
| **3** | **CIHIDEUNG** | 39.497 | 1.139 | 40.636 |
| **4** | **CIPEDES** | 44.467 | 1.559 | 46.026 |
| **5** | **INDIHIANG** | 29.114 | 729 | 29.843 |
| **6** | **KAWALU** | 51.489 | 1.541 | 53.030 |
| **7** | **MANGKUBUMI** | 51.570 | 1.553 | 53.123 |
| **8** | **PURBARATU** | 24.976 | 487 | 25.463 |
| **9** | **TAMANSARI** | 38.047 | 1.177 | 39.224 |
| **10** | **TAWANG** | 34.272 | 903 | 35.175 |
| **JUMLAH SUARA** | | 379.295 | 10.719 | 390.014 |

Sumber : <https://pilkada2017.kpu.go.id>, di akses pada tanggal 23 oktober 2017

Keberhasilan pilkada Kota Tasikmalaya yang memiliki angka partisipasi politik masyarakat yang tinggi dibanding Kota atau Kabupaten lainnya dilihat dari perbandingan partisipasi politik masyarakat Kota Tasikmalaya dengan Kota daerah lainnya, hal ini dapat di tunjukkan oleh tabel perbandingan partisipasi politik masyarakat Kota Tasikmalaya dengan 17 Kota lainnya pada pemilihan kepala daerah serentak 2017 februari lalu yakni sebagai berikut :

**1.4 Tabel Perbandingan Partisipasi Politik Kota Tasikmalaya dengan Kota lainnya pada Pilkada 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kota** | **Pemilih** | **Pengguna Hak pilih** | **Partisipasi Masyarakat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **Banda Aceh** | **149.224** | **93.569** | **62,75%** |
| **2** | **Lhokseumawe** | **126.479** | **76.538** | **60.5%** |
| **3** | **Langsa** | **110.217** | **73.980** | **67,1%** |
| **4** | **Sabang** | **25.336** | **20.832** | **80,2%** |
| **5** | **Tebing Tinggi** | **107.198** | **59.868** | **55,8%** |
| **6** | **Payakumbuh** | **84.503** | **57.743** | **68,3%** |
| **7** | **Pekan Baru** | **568.744** | **295.402** | **51.9%** |
| **8** | **Cimahi** | **375.748** | **278.066** | **74,0%** |
| **9** | **Tasikmalaya** | **474.061** | **390.014** | **81,65%** |
| **10** | **Salatiga** | **131.666** | **109.042** | **80,8%** |
| **11** | **Yogyakarta** | **301.886** | **213.948** | **70,9%** |
| **12** | **Batu** | **149.248** | **121.128** | **81,2%** |
| **13** | **Kupang** | **238.711** | **167.225** | **70,1%** |
| **14** | **SIngkawang** | **156.812** | **93.822** | **59,8%** |
| **15** | **Kendari** | **189.155** | **153.412** | **81,1%** |
| **16** | **Ambon** | **240.499** | **156.485** | **65,1%** |
| **17** | **Jayapura** | **294.063** | **142.592** | **48,5%** |
| **18** | **Sorong** | **143.060** | **95.107** | **66.5%** |

Sumber : <https://pilkada2017.kpu.go.id>, di akses pada tanggal 15 oktober 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa partisipasi politik masyarakat tertinggi pada pemilihan kepala daerah serentak februari 2017 lalu ialah Kota Tasikmalaya yakni 81,65 persen dibandingkan dengan daerah lainnya sehingga proses pelaksanaan Pilkada di Kota Tasikmalaya 15 Februari 2017 lalu mencetak sejarah, dimana tingkat partisipasi masyarakatnya dalam menyalurkan hasrat demokrasi cukup tinggi. Ketua Panwaslu Kota Tasikmalaya Ede Supriadi mengatakan bahwa proses pemilu di Kota Tasikmalaya berjalan aman dan kondusif.

Indikator tingginya partisipasi dalam pencoblosan pada Pilkada 15 Februari karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap calon kandidat kepala daerah Kota Tasikmalaya, Faktor lainnya yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan Pemilu adalah kinerja penyelenggara pemilu khususnya peran KPU dan pihak-pihak lainnya termasuk peran media massa yang sangat penting dalam menyajikan informasi dan pendidikan politik yang benar serta berimbang kepada masyarakat.[[5]](#footnote-5)

Menyikapi fenomena diatas penulis meneliti bagaimana bisa terjadi keberhasilan partisipasi politik masyarakat Kota Tasikmalaya yang tiap tahunnya selalu meningkat dan pilkada 2017 ini tingkat partisipasi masyarakat Kota Tasikmalaya lebih tinggi dibandingkan Kota/Kabupaten lainnya serta melihat bagaimana peran penyelenggara pemilu khususnya peran KPUD yang memberikan pendidikan politik, melakukan komunikasi politik, dan memberikan informasi yang baik tentang penyelenggaraan pilkada kota Tasikmalaya kepada masyarakat di kota Tasikmalaya yang akan menyalurkan hak politiknya sebagai pemilih.

Fenomena tersebut melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan magang mengenai keberhasilan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada Kota Tasikmalaya 2017 yang mampu berjalan aman dan kondusif dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu penulis mengajukan judul **“PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tasikmalaya)”.**

**1.2 RuanggLingkup, Fokus dannLokasi Penelitian Magangg**

* + 1. **Ruang Lingkup Magang**

Ruang lingkup magang ialah suatu bentuk batasan bidang bagi penulis dalam melakukan kegiatan penulisan laporan. Hal ini bertujuan agar penulis dapat memusatkan pikiran serta dapat menjelaskan bagian-bagian kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan magang itu sendiri.

Ruang lingkup dalam penelitian ini, penulis memberikan gambaran-gambaran, batasan-batasan, dari dimensi yang akan diteliti yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang tersebut, penulis akan menentukan batasan permasalahan sehingga dapat terfokus pada apa yang diteliti, maka batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi Proses keberhasilan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya Februari 2017 lalu mulai dari tahap persiapan hingga penyelenggaraan dengan melihat tingkat partisipasi politik Masyarakat Kota Tasikmalaya yang lebih tinggi dibanding Kota lainnya dan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Menganalisis kepercayaan masyarakat yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik, kepercayaan masyarakat terhadap calon Kepala Daerah tergolong tinggi yang ditunjukkan dengan terpilih kembali Drs. H. Budi Budiman sebagai Kepala Daerah Kota Tasikmalaya (Walikota).
3. Mengevaluasi penyelenggaraan pemilu dengan melihat peran KPUD dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pendidikan politik sekaligus melihat komunikasi politik yang dilakukan calon pasangan yang akan berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat Kota Tasikmalaya.
   * 1. **Fokus Penelitian Magang**

Berdasarkan pada ruang lingkup magang maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah dengan melihat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 mengenai penyelenggaraan pemilu sehingga dapat dirumuskan pada beberapa masalah yakni meliputi :

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kota Tasikmalaya 2017?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat suksesnya pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya 2017?
3. Bagaimana upaya dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Tasikmalaya?
   * 1. **Lokasi Magang**

Pada penelitian ini, penulis melaksanakan kegiatan magang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jalan SKP Nomor 20-22 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

* 1. **Maksud dan Tujuan Magang**
     1. **Maksud Magang**

Berdasarkan latar belakang dan fokus magang yang telah dikemukakan diatas, maka maksud magang ini adalah untuk memperoleh gambaran dan menganalisis bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah 2017 ini mampu lebih baik bila dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih tinggi dibanding daerah lainnya.

* + 1. **Tujuan Magang**

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, karena tujuan akan memberikan arah, pegangan, serta tolak ukur dalam melakukan suatu penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam magang ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kota Tasikmalaya 2017;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat suksesnya pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya Februari 2017;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Tasikmalaya.
   1. **Kegunaan** 
      1. **Kegunaan Teoretis**

Dengan diadakannya kegiatan magang mengenai analisis tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya diharapkan dapat memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep tentang ilmu politik pemerintah khususnya yang berkaitan langsung dengan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum sebagai pembanding terhadap teori yang sudah didapatkan selama pendidikan dan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi peneliti yang meneliti kajian yang sama.

* + 1. **Kegunaan Praktis**

Penelitian tidak hanya memiliki kegunaan teoretis, namun memiliki kegunaan praktis yang kegunaannya dapat digunakan untuk diterapkan dalam memecahkan masalah. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma IV di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan juga diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan tugas di lapangan.
2. Bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya, hasil penelitian dalam kegiatan magang ini diharapkan sebagai bahan evaluasi kepada pemerintah daerah kota Tasikmalaya dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah kota Tasikmalaya selanjutnya agar mampu lebih baik dari sebelumnya.
3. Bagi lembaga Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya dan dapat menjadi wadah bagi penulis mengaplikasikan hasil dari proses pembelajaran di kampus.

1. Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT.Gramedia Pustaka. hlm. 367 [↑](#footnote-ref-1)
2. Jurnal pemerintahan Fisip Universitas Maritim. 2011. hlm.3 [↑](#footnote-ref-2)
3. #### Saksono, Gatut. 2013. *Golput Dan Masa Depan Bangsa: Golput Sebagai Koreksi Konstruktif Terhadap Parpol, Negara, Dan Realitas Hidup.* Yogyakarta: Ampera Utama. hlm. 45

   [↑](#footnote-ref-3)
4. https://[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), diakses 9 oktober 2017) [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid. [↑](#footnote-ref-5)